

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia berjalan dengan pesat. Perkembangan ini dideskripsikan pada pertumbuhan UMKM yang semakin bertambah, secara kuantitas perbandingan jumlah pelaku UMKM lebih banyak dari pada usaha baesar (UB). Berdasarkan data *Kementrian Koperasi dan UMKM* Republik Indonesia pada web www.depkop.go.id, selama tahun UMKM memiliki jumlah yang jauh lebih banyak dari pada Usaha Besar (UB) dengan persentasi jumlah usaha yang terus meningkat.

Tabel 1.1 menyajikan pertumbuhan UMKM selama 3 tahun terakhir.

Tabel 1.1 Perkembangan UMKM 2016-2019

Usaha	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah Usaha Mikro	58.521.987	60.863.578	62.106.900	63.350.222
Jumlah Usaha kecil	681.522	731.047	757.090	783.132
Jumlah Usaha Menengah	59.263	56.551	58.627	60.702
Jumlah Usaha Besar	4.987	5.370	5.460	5.550

Sumber : Depkop.go.id (2020)

Sebagaimana dilihat pada Tabel 1.1 Perkembangan jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan tercatat sebanyak 1.271.440 UMKM pada tahun 2018. Kemudian, jumlah UMKM ini terus bertambah hingga 1.271.529 tahun 2019. Dengan demikian pertumbuhan UMKM ini juga dapat membantu perekonomian di Indonesia.

Pertumbuhan UMKM ini terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Wilayah Sumatra Barat merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan UMKM yang signifikan. Pertumbuhan ini dibuktikan dengan data Dinas Koperasi dan UMKM yang menunjukkan bahwa di provinsi ini tercatat sebanyak 108.558 UMKM aktif pada tahun 2017, jumlah ini meningkat pada tahun 2018 menjadi 110.201 dan tahun 2019 menjadi 112.458 UMKM. Namun, perkembangan dan kinerja UMKM ini berpotensi terhambat karena adanya pandemi global yang terjadi pada tahun 2020 (Dewi, 2020; Hardilawati, 2020). Indonesia dilanda wabah penyakit yang mendunia yaitu pandemi Covid-19. Data www.covid19.go.id pada 10 Januari 2021 di Indonesia telah terkonfirmasi 846.765 kasus positif covid-19. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat di Sumatera Barat terdapat 24.599 kasus positif covid-19 berada di Sumatera barat (Corona.sumbarprov.go.id, 2020). Dewi (2020)

menyebutkan bahwa meluasnya pandemi covid-19 menimbulkan reaksi berantai (*domino effect*) dari masalah kesehatan kemasalah sosial, dan kemudian kepermasalahan ekonomi yang juga termasuk pelaku usaha.

Untuk mencegah meluasnya wabah pandemi covid-19 pemerintah provinsi Sumatra Barat kemudian mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan maksud membatasi aktivitas sosial demi mencegah penyebaran Coronavirus (COVID-19). Namun, Hardilawati (2020) menyebutkan bahwa penetapan PSBB mengakibatkan terbatasnya kegiatan operasional UMKM, membuat menurunnya daya beli konsumen, sulitnya memperoleh bahan baku, terhambatnya distribusi & produksi sehingga UMKM akan terancam mengalami kerugian.

Bahkan dari informasi yang dikutip pada Sumatera.bisnis.com menyebutkan bahwa tidak sedikit pelaku UMKM harus menutup usahanya karena tidak mampu bertahan semenjak pandemi Covid-19. Terpukulnya sektor UMKM ini menyebabkan turunnya perekonomian karena UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional (Djkn.kemenkeu.go.id, 2020). Dilansir dari Kominfo.go.id berdasarkan survei yang dilakukan oleh katadatainsight center (KIC), menemukan bahwa 82.9% UMKM terpukul akibat pandemi covid. Bahkan 56.8% di antaranya berada dalam kondisi buruk. Hanya 5.9% saja UMKM yang mampu memetik untung saat PSBB pertama diterapkan di beberapa kota di Provinsi Sumatra Barat pada Juni 2020. Akibatnya, Sumatra Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif, menurut keterangan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, perekonomian daerah selama triwulan II tahun tumbuh minus 4,91 persen, terkontraksi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya 5,05 persen (Sumbar.bps.go.id, 2020).

UMKM harus mampu menyesuaikan diri agar dapat bertahan di tengah pandemi-covid 19. Sok & O'Cass (2011) menyebutkan bahwa untuk menjaga kinerja UKM tetap optimal, UKM dapat menerapkan strategi dengan mengelola sumber daya yang ada. Salah satu teori yang membahas mengenai sumber daya pada usaha adalah Teori *Resource Based View* (RBV) (Hansen & Wernerfelt, 1989) yang menyebutkan bahwa pelaku usaha harus memanfaatkan sumber daya,

serta menjaga kemampuan kapabilitas untuk menjaga kinerja tetap optimal dan meningkatkan daya saing. Kerangka RBV memiliki banyak pilihan sumber daya yang relevan secara strategis sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan perusahaan (Spillan & Parnell, 2006). Sumber daya ini terbagi atas dua hal, yaitu berwujud dan tidak berwujud. Sumber daya berwujud termasuk modal keuangan (misalnya, modal ekuitas, modal hutang, laba ditahan) dan modal fisik (misalnya, mesin & bangunan). Sumber daya tak berwujud antara lain terdiri dari pengetahuan kewirausahaan, keterampilan, pengalaman, prosedur organisasi, dan reputasi (Eniola & Entebang, 2015a). Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pelaku usaha secara optimal merupakan salah satu cara untuk menjaga eksistensi usaha, dan meningkatkan kinerja usahanya sekaligus sebagai strategi bertahan agar tetap optimal di tengah pandemi covid-19.

Untuk menjawab permasalahan bagaimana pelaku UMKM mengoptimalkan sumber daya mereka dengan baik, Eniola & Entebang (2015b) telah menjelaskan bahwa sumber daya tidak berwujud seperti keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pelaku usaha merupakan sumber daya yang dianggap pertama kali harus dimiliki pelaku usaha karena hal ini merupakan tolok ukur penting pada kekuatan atau kelemahan pelaku usaha sebagai sumber daya manusia, karena yang mengelola modal fisik dan modal keuangan adalah sumber daya manusia (*human capital*) dengan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, pelaku usaha membutuhkan literasi dalam mengelola bisnis mereka. Dahmen & Rodríguez (2014) menjelaskan bahwa kesuksesan UMKM berkaitan dengan literasi keuangan yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut.

Literasi keuangan adalah pendidikan dan pemahaman tentang berbagai bidang keuangan. Konsep ini berfokus pada kemampuan untuk mengelola keuangan dengan cara yang efisien, dan itu termasuk pengetahuan dalam membuat keputusan yang tepat tentang keuangan seperti investasi, asuransi, real estat, penganggaran, dan perencanaan pajak (Fatoki, 2014). Selain itu, Literasi keuangan juga melibatkan penguasaan prinsip dan konsep keuangan seperti perencanaan keuangan, bunga majemuk, pengelolaan hutang, teknik menabung yang menguntungkan dan nilai waktu dari uang (Esiebugie, Richard, & Emmanuel, 2018). Oleh sebab itu, literasi keuangan diasumsikan sebagai sumber

daya yang berharga bagi pelaku usaha. Purnomo (2019) menegaskan bahwa literasi keuangan dapat membuat pelaku usaha terhindar dari kegagalan bisnis yang disebabkan oleh manajemen keuangan yang buruk. Mengkonfirmasi hal ini, studi oleh Kelley et al. (2011) di *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM) membuktikan bahwa kurangnya literasi keuangan bagi pelaku usaha dapat menyumbangkan menjadi salah satu faktor pada tingkat kegagalan usaha, terutama UKM.

Secara empiris, Wise (2013) melakukan investigasi untuk membuktikan dampak literasi keuangan pada kelangsungan usaha di Kanada. Dia membuktikan bahwa peningkatan literasi keuangan menyebabkan kemungkinan yang lebih rendah untuk menutup usaha mereka. Dalam nada yang sama, Chepngetich (2016) meneliti pengaruh literasi keuangan pada kinerja UKM di Kenya pada 290 UKM kabupaten Uasin Gishu di Kenya. Dia membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan literasi keuangan terhadap kinerja UKM berdasarkan segi literasi pinjaman dan literasi keuangan anggaran. Selanjutnya, Esiebugie et al. (2018) membuktikan bahwa literasi keuangan yang diwakili oleh dimensi pengetahuan, perilaku, dan sikap keuangan berpengaruh pada kinerja UKM di 154 UKM Nigeria. Mengonfirmasi hal ini, Siekei et al., (2013) juga menemukan bukti kongkrit pada peningkatan kinerja UKM di daerah Njoro Kenya, yang di mana setelah dilakukan program penganggaran, analisis keuangan, manajemen kredit dan keterampilan pembukuan terdapat peningkatan yang signifikan dalam kinerja pendapatan usaha kecil yang pengelolanya pernah mengikuti program literasi keuangan.

Sama halnya dengan literasi keuangan, inklusi juga merupakan hal penting bagi pelaku UMKM. Setelah pelaku UMKM mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keuangan dengan literasi yang baik. Untuk mengaplikasikannya pelaku usaha harus mendapatkan fasilitas inklusi keuangan. World Bank mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan seperti transaksi, pembayaran, tabungan kredit dan asuransi yang digunakan secara berkelanjutan (Worldbank.org, 2021). Berdasarkan bukti empiris, Salman et al., (2015) meneliti pengaruh inklusi keuangan terhadap pertumbuhan UKM dan pembangunan ekonomi di Nigeria. Mereka membuktikan

bahwa inklusi keuangan yang dideskripsikan melalui dimensi penggunaan akses mobile banking, dan menggunakan layanan perbankan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan UKM. Sejalan dengan itu, Agbim (2020) mengonfirmasi bukti bahwa UKM di Nigeria yang mengadopsi perangkat inklusi keuangan seperti perangkat pembayaran dan penerimaan uang mengalami peningkatan baik dalam kinerja keuangan maupun non-keuangannya. Sejalan dengan itu, Riwayati (2017) berhasil membuktikan bahwa Inklusi keuangan para pelaku usaha mampu menjadi mediator penentu keberhasilan UMKM pengrajin batu di Kabupaten Magelang Jawa Tengah Indonesia.

Selain mendapatkan literasi keuangan yang cukup dan memiliki fasilitas inklusi keuangan yang memadai, pelaku UMKM juga harus memiliki modal sosial dalam aktivitas bisnis untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki (Akintimehin et al., 2019). Modal sosial merupakan solidaritas, kepercayaan diri, struktural, relasi, dan kognitif yang merupakan faktor-faktor yang berasal dari hubungan sosial yang melibatkan keluarga, teman, rekan kerja dan lain-lain (Felićio, Couto, & Caiado, 2014). Hubungan semacam itu memberikan akses ke sumber daya berharga seperti informasi (Adler & Kwon, 2002). Selain itu, pelaku usaha sering mengambil keputusan berdasarkan persahabatan, nasihat teman dan hubungan lain (Bennett & Robson, 1999). Oleh sebab itu, modal sosial ini juga merupakan sumber evaluasi diri yang penting bagi wirausahawan, membantu mengidentifikasi, mengartikulasikan, dan mengevaluasi peluang bisnis (Aldrich & Zimmer, 1986). Secara khusus, Akintimehin et al. (2019) menjelaskan bagaimana modal sosial dapat meningkatkan kinerja pelaku usaha. Mereka menyebutkan bahwa Pelaku usaha memungkinkan dukungan kredit dari kreditor, pasokan informasi pasar yang valid dan rujukan dari pelanggan setia jika memiliki modal sosial pada pihak eksternal. Sementara modal sosial internal memungkinkan dukungan dari keluarga, teman dan kolega profesional dalam hal pinjaman finansial atau hadiah dan nasihat bisnis strategis.

Bukti temuan empiris, Zhang & Fung (2006) membuktikan bahwa modal sosial yang dimiliki perusahaan di china berupa keanggotaan di berbagai organisasi dan aliran modal sosial merupakan penentu kinerja yang signifikan pada perusahaan. Selanjutnya, Akintimehin et al. (2019) mengidentifikasi

pengaruh modal sosial pada kinerja bisnis pada informal sektor di Nigeria. Secara umum investigasi mereka menemukan bahwa modal sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bisnis. Namun, jika diklasifikasikan secara spesifik mereka mendeskripsikan bahwa modal sosial internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja non-keuangan, namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan modal sosial eksternal modal sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan non keuangan. Dalam nada yang sama, secara jelas temuan Chung & Gibbons (1997), Gabbay & Zuckerman (1998), dan Murphy (2002) membuktikan bahwa modal sosial dapat meningkatkan kinerja pelaku wirausaha dengan mengurangi biaya transaksi, meningkatkan kerjasama, memfasilitasi kewirausahaan, memperkuat hubungan dengan pemasok dan jaringan regional, dan meningkatkan pembelajaran antar pelaku usaha.

Dokumentasi penelitian sebelumnya telah menunjukkan pengaruh antara literasi keuangan dengan kinerja UKM di beberapa negara seperti Kanada (Wise, 2013), Kenya (Siekei, 2013; Chepngetich, 2015), dan Nigeria (Esiebugie et al. 2018). Kemudian, temuan penelitian sebelumnya juga telah menunjukkan adanya pengaruh antara inklusi keuangan dengan kinerja UKM di Nigeria (Salman et al., 2015; Agim 2020). Peneliti berpendapat terdapat perbedaan pada tingkat literasi dan inklusi keuangan di negara-negara penelitian sebelumnya dengan Indonesia tempat penelitian ini dilakukan. Hal ini dibuktikan berdasarkan survei nasional Otoritas Jasa keuangan (OJK) literasi dan inklusi keuangan pada tahun 2019 secara nasional indeks rata-rata literasi keuangan mencapai 38.03% dan Inklusi Keuangan mencapai 76,19%, dikutip dari artikel berita Suara.com (2020) dan Mediaindonesia.com (2021) tingkat persentase literasi dan inklusi keuangan ini terendah di Asia tenggara. Selain itu, peneliti berpendapat bahwa terdapat karakteristik yang berbeda antara UKM di beberapa negara penelitian terdahulu dengan UMKM di Indonesia seperti modal dasar, struktur kepemilikan, dan regulasi yang berlaku. Oleh sebab itu, dengan perbedaan ini terdapat potensi perbedaan hasil penelitian.

Sepanjang pengetahuan peneliti, penelitian mengenai literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Indonesia telah dilakukan di Jawa

Tengah (Aribawa, 2016b), Jawa Timur (Rahayu & Musdholifah, 2017), Jawa Barat (Rumbianingrum & Wijayangka, 2018), Bali (Idawati & Pratama, 2020), Kalimantan Timur (Sanistasya, Raharjo, & Iqbal, 2019) yang menemukan bukti bahwa literasi dan inklusi keuangan ini dapat mempengaruhi kinerja UMKM secara positif. Lokasi penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu dilakukan pada daerah yang telah mempunyai tingkat literasi dan inklusi keuangan yang tinggi yaitu daerah dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan di atas rata-rata nasional¹. Berdasarkan pencarian literatur yang telah dilakukan peneliti belum menemukan temuan empiris mengenai literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Sumatra Barat. Oleh sebab itu, untuk mengisi kekosongan ini penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Selain itu, Provinsi wilayah Sumatra Barat memiliki indeks literasi dan inklusi yang berada dibawah rata-rata nasional, yaitu literasi keuangan berada pada 34.55% dan inklusi keuangan berada pada tingkat 66.75%. Padahal inklusi keuangan yang memadai amat dibutuhkan bagi pelaku UMKM misalnya akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keaungan untuk meningkatkan kinerja bisnisnya (Salman et al., 2015). Hal ini menunjukkan wilayah sumatra barat masih memiliki tingkat literasi dan inklusi yang rendah dibandingkan dengan provinsi lain yang digunakan sebagai lokasi penelitian Aribawa (2016), Rahayu (2017), Kasenda & Wijayangka (2019), Idawati & Pratama (2020), Sanistasya et al. (2019) yang indeks persentasenya diatas atau sama dengan rata-rata nasional. Dengan demikian, perbedaan ini berpotensi memberikan temuan penelitian yang berbeda, sehingga dengan adanya perbedaan ini perlu untuk dikonfirmasi kembali.

Tujuan penelitian ini akan menguji Literasi keuangan, Inklusi keuangan, dan Modal Sosial terhadap kinerja UMKM di Sumtra Barat pada Masa PandemiCovid-19. Secara khusus, penelitian ini akan menguji secara empiris bagaimana Literasi keuangan, Inklusi keuangan, dan Modal Sosial mempengaruhi kinerja UMKM di masa pandemi covid-19 yang di mana berdasarkan temuan empiris

¹ Berdasarkan survei nasional Otoritas Jasa keuangan (OJK) literasi dan inklusi keuangan pada tahun 2019 secara nasional indeks rata-rata literasi keuangan mencapai 38.03% dan Inklusi Keuangan mencapai 76,19%. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Inklusi, Bali, dan Kalimantan Timur >39% dan Literasi >80%, dikutip dari Survey OJK 2019

penelitian sebelumnya telah dibuktikan bahwa ke-3 variabel ini dapat meningkatkan kinerja UMKM, selain itu ke-3 variabel ini termasuk dalam sumberdaya tidak berwujud yang dijelaskan pada teori *Resource Based View* (RBV), olehsebab itu jika sumber daya ini dapat dimiliki atau dikelola dengan baik olehpelaku UMKM, sumber daya ini dapat menjadi potensi meningkatkan kinerja UMKM terutama untuk strategi bertahan di masa pandemi covid-19 yang akan dibuktikan lebih lanjut secara empiris pada penelitian ini.

